

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (pada tingkat daerah). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pada mulanya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan PP 24/2005 menggunakan basis CTA atau *Cash Toward Accrual*, dan hanya berisi komponen LRA, CaLK, Neraca, dan LAK. Kemudian akhirnya setelah PSAP berbasis akrual terbit, yakni PP 71/2010, penyusunan LKPD menggunakan basis Akrual dan menambah tiga komponen laporan keuangan lain berupa LO, LPE, dan LPSAL. Penggunaan SAP akrual dalam LKPD ini sudah secara efektif berlaku sejak tahun 2010, dan sudah diwajibkan bagi seluruh entitas sejak tahun 2015.

Meskipun sudah menggunakan SAP akrual, namun basis akuntansi untuk tiap komponen LKPD tidak sepenuhnya berbasis akrual. LRA dan LPSAL sebagai komponen Laporan Pelaksanaan Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE sebagai komponen Laporan Finansial menggunakan basis akrual. Hal yang membedakan kedua basis yang digunakan tersebut adalah basis kas mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan pada saat kas

diterima/dibayarkan, sedangkan basis akrual mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat terjadinya hak/kewajiban.

Salah satu laporan yang sifatnya melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual adalah Laporan Operasional (LO). Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa LO merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. LO menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup Pendapatan-LO, Beban, Transfer, Surplus/Defisit Dari Operasi, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, dan Pos-Pos Luar Biasa.

Penggunaan basis akrual dalam proses penyusunan LO memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga dapat menunjukkan gambaran posisi keuangan yang lebih luas dibandingkan dengan basis Kas maupun basis CTA. Selain itu menurut Martina (2020), penggunaan basis akrual juga menghasilkan informasi yang lebih akurat dikarenakan pencatatan dilakukan saat munculnya hak/kewajiban (terjadi transaksi) sehingga informasi yang disajikan lebih jelas dan detail. Oleh karena itu, penggunaan basis akrual dapat memudahkan entitas dalam mengukur dan menilai aset, kewajiban, serta ekuitasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan unit penyelenggara pemerintahan daerah, berdasar azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 di wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Sebagai entitas akuntansi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPKAD, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan APBD-nya diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban berupa akuntansi dan pelaporan. Salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban tersebut adalah Menyusun Laporan Operasional.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, kecamatan, serta kelurahan. Menurut Adminwarta (2016), Wali Kota Yogyakarta, Drs. Triwidyanto, menyebutkan bahwa LKPD berbasis akrual akan memungkinkan SKPD atau Instansi untuk menyediakan informasi yang paling komprehensif dan aktual, karena seluruh arus sumber daya dicatat. Selain itu menurut Drs. Triwidyanto pencatatan berbasis akrual juga memungkinkan SKPD atau instansi untuk melakukan pencatatan penyusutan nilai aset.

Dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi, Pemkot Yogyakarta berpedoman dan berlandaskan pada Perwali Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016. Perwali tersebut mengatur mengenai kebijakan akuntansi Pendapatan dan Beban, termasuk bagaimana menyajikan dua komponen tersebut dalam LO. Selain itu, Perwali tersebut juga mengatur mengenai gabungan laporan keuangan dari semua entitas akuntansi dan pelaporan Kota Yogyakarta, yang dikenal dengan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya dengan komponen Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, hasil tinjauan tersebut akan dijadikan karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS

LAPORAN OPERASIONAL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penulisan karya tulis ini antara lain:

- 1) Bagaimana praktik penyusunan LO pada Pemerintah Kota Yogyakarta?
- 2) Bagaimana praktik penyajian dan pengungkapan LO pada Pemerintah Kota Yogyakarta?
- 3) Bagaimana keterkaitan LO dengan Laporan Akuntansi lainnya (LPE dan Neraca)?
- 4) Bagaimana kesesuaian penyajian dan pengungkapan LO pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian atas rumusan masalah, tujuan dari penulisan karya tulis ini antara lain:

- 1) Mengetahui bagaimana praktik penyusunan LO pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 2) Mengetahui bagaimana praktik penyajian dan pengungkapan LO pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3) Mengetahui bagaimana keterkaitan LO dengan Laporan Akuntansi lainnya (LPE dan Neraca).

- 4) Meninjau kesesuaian penyajian dan pengungkapan LO pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan masalah pada tinjauan atas kesesuaian Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Peraturan yang menjadi landasan teori penulis antara lain PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Perwali Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

- 1) Menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pemda (Pemkot) dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Operasional ke depannya.
- 2) Menjadi alat untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih transparan untuk para pihak terlibat, termasuk masyarakat.

- 3) Menjadi sumber ilmu bagi publik dalam hal terkait penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya Penyusunan Laporan Operasional.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai apa saja yang melandasi disusunnya karya tulis ini. Bab ini mencakup beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori-teori yang menjadi acuan dalam melakukan tinjauan terhadap masalah. Teori-teori tersebut adalah teori yang berlaku sesuai dengan peraturan yang mengatur hal terkait dengan masalah dalam karya tulis ini yaitu Laporan Operasional. Peraturan tersebut antara lain PP Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 12, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta Perwali Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data dan fakta mengenai Pemerintah Kota Yogyakarta mulai dari profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta uraian singkat mengenai entitas akuntansi dari satker ini. Bab ini juga berisi implementasi penyusunan dan penyajian Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya dalam bab ini terdapat pula hasil pembahasan penulis mengenai tinjauan atas penyusunan Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga berisi saran terkait penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan hasil tinjauan sebelumnya.